

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP TINGKAT KETIMPANGAN
ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Mochamad Arief Darmawan
NIM : 20313088
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP TINGKAT
KETIMPANGAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembanguna,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Mochamad Arief Darmawan
Nomor Mahasiswa : 20313088
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UH. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Penulis,


Mochamad Arief Darmawan

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan antar Provinsi di
Indonesia

Nama : Mochamad Arief Darmawan
Nomor Mahasiswa : 20313088
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 06 Maret 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Provinsi di Indonesia

Disusun oleh : MOCHAMAD ARIEF DARMAWAN

Nomor Mahasiswa : 20313088

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 17 Mei 2024


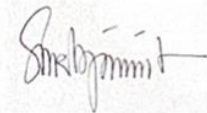
Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Johana Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. 

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin.

Puji dan syukur senantiasa kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan karunia-Nya serta kemudahan dan kelancaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta dan terkasih yaitu, Aswandi dan Mama Linda yang senantiasa selalu melimpahkan cinta serta dukungan yang sangat besar terhadap diri peneliti hingga bisa berada di jenjang tertinggi saat ini.
2. Kakakku Guswanda Andi Putra Pratama, Nur Naomi Hanatasya, dan Siti Maryam yang selalu memberi dorongan untuk peneliti agar selalu semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman terdekat yang selalu menjadi support system dan memberi masukan serta bantuan untuk peneliti mulai dari awal hingga saat ini.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahilahi rabbil ' alamin.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan seluruh nikmat, rahmat, hidayah dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan panutan yang baik dalam menjalankan kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan antar Provinsi di Indonesia”*** dengan baik. Penyusunan skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana jenjang strata 1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak sekali kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas;
2. Kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memberikan panutan yang baik;
3. Yth. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
4. Yth. Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. selaku kepala Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
5. Yth. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang sangat sabar mendidik penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan masukan, saran serta senantiasa membimbing hingga dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik;
6. Yth. Ibu Diana Wijayanti, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang

telah memberikan bimbingan dan memberi nasihat selama menempuh kuliah hingga mampu menyelesaikan laporan ini;

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII yang selalu memberikan inspirasi serta motivasi bagi diri penulis untuk menjadi pribadi yang lebih berkembang;
8. Kedua Orang Tua, Papa Aswandi dan Mama Linda yang selalu memberikan kekuatan serta motivasi untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan di masa depan;
9. Teman-teman terdekat dan jauh yang selalu menemani dan mendukung penulis sejak awal mulai perkuliahan hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teman-teman yang selalu mendukung dan memberi support bagi penulis baik keadaan suka maupun duka. Semoga apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini merupakan jalan pembuka bagi keberhasilan dan kesuksesan kalian di masa depan;
10. Untuk diri sendiri Mochamad Arief Darmawan. Walaupun tidak mudah dan banyak berbagai rintangan dalam mencapai titik ini, tetaplah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, rendah hati dan pantang menyerah dalam menghadapi segala hal. Terimakasih telah bertahan dan berjuang dari awal hingga saat ini.

Dengan demikian, segala sesuatu yang dikerjakan hendaknya dikembalikan kepada Allah SWT. Semoga inti dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat serta wawasan baru terhadap para pembaca. Untuk itu, adanya pemberian saran dan kritik sangat membantu penulis dalam rangka perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan rahmat dan berkah-Nya terhadap kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Mochamad Arief Darmawan

MOTTO

“When you have children, you always have family. They will always be your priority, your responsibility, and a man, a man provides, and he does it even when he’s not appreciated or respected or even loved. He simply bears up and he does it because he’s a man.”

(Gus Fring from Breaking Bad)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR	VI
MOTTO	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR GRAFIK.....	XIV
ABSTRAK.....	XV
BAB I.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB II	10
2.1 KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.2 LANDASAN TEORI.....	20
2.2.1 <i>Ketimpangan Ekonomi</i>	20
2.2.2 <i>Kebijakan Fiskal</i>	22
2.2.3 <i>Pajak</i>	25
2.2.4 <i>Subsidi</i>	26
2.2.5 <i>Pengeluaran Pemerintah</i>	27
2.2.6 <i>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</i>	28
2.3 HUBUNGAN ANTARA VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN	29

2.3.1	HUBUNGAN ANTARA PAJAK DENGAN KETIMPANGAN.....	29
2.3.2	HUBUNGAN ANTARA SUBSIDI DENGAN KETIMPANGAN.....	30
2.3.3	HUBUNGAN ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DENGAN KETIMPANGAN.....	30
2.3.4	HUBUNGAN ANTARA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DENGAN KETIMPANGAN	30
2.4	KERANGKA PEMIKIRAN	32
2.5	HIPOTESIS	33
BAB III.....		34
3.1	JENIS DAN SUMBER DATA	34
3.2	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	34
3.2.1	<i>Variabel Dependen</i>	34
3.2.2	<i>Variabel Independen</i>	35
3.3	METODE ANALISIS DATA.....	35
3.3.1	<i>Common Effect Model (CEM)</i>	36
3.3.2	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	36
	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{26} D_{26} + \epsilon_{it}$	36
3.3.3	<i>Random Effect Model (REM)</i>	36
	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{26} D_{26} + \epsilon_i + \epsilon_{it}$	36
3.4	PENENTUAN METODE ESTIMASI REGRESI DATA PANEL	37
3.4.1	<i>Uji Chow</i>	37
3.4.2	<i>Uji Hausman</i>	37
3.4.3	<i>Uji Langrange Multiplier (LM)</i>	38
3.5	PENGUJIAN HIPOTESIS	38
3.5.1	<i>Koefisien Regresi Bersama (Uji F)</i>	38
3.5.2	<i>Koefisien Regresi Parsial (Uji T)</i>	38
3.5.3	<i>Koefisien Determinasi (R²)</i>	39
BAB IV		40
4.1	DESKRIPSI DATA PENELITIAN	40
4.2	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
4.2.1	<i>Common Effect Model</i>	41
4.2.2	<i>Fixed Effect Model</i>	42
4.2.3	<i>Random Effect Model</i>	42
4.3	PEMILIHAN MODEL TERBAIK.....	43
4.3.1	<i>Uji Chow</i>	43
4.3.2	<i>Uji Hausman</i>	43
4.4	INTERPRESTASI MODEL TERBAIK.....	44

4.4.1	<i>Uji Kelayakan Model (Uji F)</i>	45
4.4.2	<i>Uji Statistik (Uji T)</i>	45
4.4.3	<i>Uji Keباikan Regresi (R²)</i>	47
4.4.4	<i>Interpretasi Persamaan Regresi</i>	47
4.5	ANALISIS CROSS SECTION EFFECT PADA MODEL TERBAIK.....	48
4.6	PEMBAHASAN.....	50
4.6.1	<i>Pengaruh Pajak terhadap Tingkat Ketimpangan</i>	50
4.6.2	<i>Pengaruh Subsidi terhadap Tingkat Ketimpangan</i>	51
4.6.3	<i>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Ketimpangan</i>	51
4.6.4	<i>Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Ketimpangan</i>	51
BAB V		53
5.1	SIMPULAN.....	53
5.2	IMPLIKASI	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Gini Provinsi Indonesia 2018-2022	2
Tabel 1.2 Pajak Provinsi Indonesia (Ribuan Rupiah)	5
Tabel 1.3 Subsidi Provinsi Indonesia (Ribuan Rupiah)	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Common Effect Model	42
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	42
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Random Effect Model	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow	43
Tabel 4.6 Hasil Uji LM	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Terbaik	44
Tabel 4.9 Regresi Data Panel Model Terbaik: Fixed Effect Model	44
Tabel 4.10 Hasil Analisis Cross Section Effect	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Kuznet	21
Gambar 2.2 Kurva Lorenz	22
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Hasil Analisis Cross Section Effect	49
--	----

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berhasil mengalami peningkatan cukup signifikan pasca krisis moneter yang melanda, sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak krisis ekonomi terakhir kali. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia juga dibantu dengan menurunnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah kemiskinan, hal ini tidak mengikuti menurunnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap ketimpangan antar Provinsi yang ada di Indonesia di tahun 2018-2022. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung di dapat tetapi melalui pihak ketiga. Sumber data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022, sedangkan data *cross section* terdiri dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Adapun data yang meliputi yaitu data, Gini Ratio, Pajak, Subsidi, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan data antara *time series* dan *cross section*. Alat yang dipakai yaitu Eviews 12. Hasil menunjukkan bahwa pajak dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan. Namun, hasil dari subsidi berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Hasil dari PDRB berpengaruh negatif sehingga dapat untuk menurunkan ketimpangan yang ada di Provinsi di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Ketimpangan, Regresi Data Panel, *Time Series*, *Cross Section*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia bisa dibilang berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu negara yang memiliki Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak krisis ekonomi terakhir kali. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia juga dibantu dengan menurunnya Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Jumlah dari orang yang kurang mampu di Indonesia menurun dari 54 Juta di tahun 1997 menjadi 25,90 juta orang penduduk yang miskin di tahun 2023 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Meskipun Indonesia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah kemiskinan, hal ini tidak mengikuti berkurangnya ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat ke empat ketimpangan ekonomi di seluruh dunia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga keuangan Swiss, selain itu juga menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ditahun 2016 tingkat indeks gini mencapai angka 0.41% sehingga Indonesia dapat menempati urutan ke empat ketimpangan ekonomi di seluruh dunia. Menurut *Global Wealth Report 2018* dari *Credit Suisse*, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan total penduduk dewasa di negara itu, dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% kekayaan total penduduk. Artinya, orang-orang kaya di negara ini hanya menikmati pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Selain itu, situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia masih sangat tinggi, yang dapat menjadi masalah yang signifikan di masa depan.

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengarah kepada standar hidup yang relatif pada seluruh Masyarakat. Perbedaan ini yang menyebabkan Tingkat Pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda, sehingga memunculkan gap atau jarak kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Selain itu, ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang biasanya di hadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Tambunan (2001a) permasalahan seperti ketimpangan dan kesenjangan ekonomi merupakan dua masalah besar yang sering dialami oleh negara berkembang, dengan adanya ketimpangan distribusi pendapatan kelompok masyarakat

berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap pembangunan memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986).

Tabel 1.1 Rasio Gini Provinsi Indonesia 2018-2022 (Persen)

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	0.318	0.321	0.319	0.323	0.291
Sumatera Utara	0.311	0.315	0.314	0.313	0.326
Sumatera Barat	0.305	0.307	0.301	0.300	0.292
Riau	0.347	0.331	0.321	0.327	0.323
Jambi	0.335	0.324	0.316	0.315	0.335
Sumatera Selatan	0.341	0.339	0.338	0.340	0.330
Bengkulu	0.355	0.329	0.323	0.321	0.315
Lampung	0.326	0.331	0.320	0.314	0.313
Kep. Bangka Belitung	0.272	0.262	0.257	0.247	0.255
Kep. Riau	0.339	0.337	0.334	0.339	0.325
DKI Jakarta	0.390	0.391	0.400	0.411	0.412
Jawa Barat	0.405	0.398	0.398	0.406	0.412
Jawa Tengah	0.357	0.358	0.359	0.368	0.366
DI Yogyakarta	0.422	0.428	0.437	0.436	0.459
Jawa Timur	0.371	0.364	0.364	0.364	0.365
Banten	0.367	0.361	0.365	0.363	0.377
Bali	0.364	0.370	0.369	0.375	0.362
Nusa Tenggara Barat	0.391	0.374	0.386	0.384	0.374
Nusa Tenggara Timur	0.359	0.355	0.356	0.339	0.340
Kalimantan Barat	0.325	0.318	0.325	0.315	0.311
Kalimantan Tengah	0.344	0.335	0.320	0.320	0.309
Kalimantan Selatan	0.340	0.334	0.351	0.325	0.309
Kalimantan Timur	0.342	0.335	0.335	0.331	0.317

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Utara	0.304	0.292	0.300	0.285	0.270
Sulawesi Utara	0.372	0.376	0.368	0.359	0.359
Sulawesi Tengah	0.317	0.330	0.321	0.326	0.305
Sulawesi Selatan	0.388	0.391	0.382	0.377	0.365
Sulawesi Tenggara	0.392	0.393	0.388	0.394	0.366
Gorontalo	0.417	0.410	0.406	0.409	0.423
Sulawesi Barat	0.366	0.365	0.356	0.366	0.371
Maluku	0.326	0.320	0.326	0.316	0.306
Maluku Utara	0.336	0.310	0.290	0.278	0.309
Papua Barat	0.391	0.381	0.376	0.374	0.384
Papua	0.398	0.391	0.395	0.396	0.393
Indonesia	0.384	0.380	0.385	0.381	0.381

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Dari Tabel 1.1 dalam 5 tahun belakangan rasio gini negara Indonesia mengalami fluktuasi, dari data tersebut Provinsi DI Yogyakarta memiliki rasio gini paling besar di Indonesia sebesar 0,459 dan selanjutnya disusul oleh Provinsi Gorontalo yang memiliki rasio gini sebesar 0,423 dan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta sebesar 0,412 di tahun 2022. Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi yang memiliki rata-rata rasio gini terkecil di Indonesia yaitu sebesar 0,270. Situasi ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan ekonomi yang ada di antara provinsi-provinsi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara kebijakan fiskal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi negara Indonesia. Beberapa cara yang telah diberlakukan yaitu, redistribusi pendapatan melalui pajak progresif, subsidi di berbagai sektor-sektor yang kurang berkembang, dan pengeluaran public yang ditujukan untuk sektor-sektor yang membutuhkan hal tersebut (Dwi, 2023). Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Alfirman et al., 2015), kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak yang positif namun tidak bisa mengurangi dampak dari ketimpangan ekonomi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kebijakan fiskal berhasil menurunkan indeks Gini dari 0,394 menjadi 0,370, serta dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang terjadi di Indonesia dari 12,1% menjadi 10,5%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa warga Indonesia tidak membayar pajak

penghasilan dan 40% dari penduduk miskin terkena dampak kemiskinan akibat dari pajak dan transfer.

Oleh sebab itu penelitian mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia menjadi suatu isu yang penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk menjaga ekonomi dan mencapai tujuan tertentu. Ketika dapat diterapkan dengan baik, kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memperluas akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, kebijakan fiskal yang tidak efektif atau tidak adil dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dengan menguntungkan kelompok yang lebih kaya dan mengabaikan kebutuhan kelompok yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan ketimpangan ekonomi guna merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mencapai pembangunan inklusif.

Sejumlah penelitian empiris yang pernah dilakukan sebelumnya tentang analisis mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Menurut penelitian (Gupta et al., 2014), di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (S et al., 2023), yang dimana Penelitian ini meneliti dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, meskipun dampaknya terbatas. Penelitian ini menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam mengurangi disparitas regional dan mengatasi ketimpangan ekonomi.

Tabel 1.2 Pajak Provinsi Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	5,060.92	1,902.77	1,929.10	2,012.27	2,236.80
Sumatera Utara	7,874.45	8,184.62	7,798.45	9,046.73	10,505.78
Sumatera Barat	2,482.25	2,605.19	2,462.10	2,786.16	3,110.86
Riau	4,264.74	4,402.48	4,054.47	4,813.55	5,697.33
Jambi	1,882.59	1,853.48	1,751.91	2,074.22	2,463.16
Sumatera Selatan	4,479.56	4,722.41	4,613.36	5,099.58	6,485.77
Bengkulu	865.30	827.10	739.46	974.61	1,122.27
Lampung	3,389.86	3,599.40	3,294.01	3,696.77	4,280.26
Kep. Bangka Belitung	1,200.70	1,171.67	977.82	1,216.04	1,422.57
Kep, Riau	2,558.70	2,832.33	2,227.57	2,548.32	3,105.09
DKI Jakarta	37,538.91	40,298.12	31,895.26	34,575.56	40,275.15
Jawa Barat	30,915.27	33,954.58	29,637.05	33,158.68	38,052.81
Jawa Tengah	16,464.01	17,592.39	16,380.14	17,391.43	20,533.04
DI Yogyakarta	3,014.26	3,211.46	2,823.94	2,932.00	3,632.81
Jawa Timur	24,425.32	25,484.48	23,263.32	25,257.95	28,999.81
Banten	11,993.27	13,407.83	11,309.59	13,010.54	15,738.09
Bali	8,846.20	9,743.45	5,413.67	4,971.10	8,398.45
Nusa Tenggara Barat	1,805.81	2,004.86	1,792.20	1,973.71	2,401.15
Nusa Tenggara Timur	1,268.59	1,397.79	1,301.11	1,329.40	1,646.40
Kalimantan Barat	2,875.51	2,863.60	2,588.82	2,987.61	3,668.97
Kalimantan Tengah	1,808.43	1,970.57	1,654.24	1,944.52	2,728.82
Kalimantan Selatan	3,568.81	3,579.98	2,892.71	3,384.41	4,760.88
Kalimantan Timur	5,927.89	6,414.51	5,139.85	6,215.83	9,329.81
Kalimantan Utara	497.32	551.41	470.59	559.19	828.19
Sulawesi Utara	1,591.22	1,659.35	1,384.78	1,600.09	1,867.42
Sulawesi Tengah	1.168.77	1.271.72	1.259.19	1.532.36	1.876.60
Sulawesi Selatan	5.270.31	5.743.30	5.209.06	5.822.63	6.712.54
Sulawesi Tenggara	928.04	1.140.65	1.045.11	1.385.09	1.587.46
Gorontalo	475.54	536.95	466.16	531.37	596.37
Sulawesi Barat	350.52	377.72	370.68	426.09	470.64
Maluku	537.01	561.93	543.89	566.81	714.61
Maluku Utara	389.26	476.07	474.97	593.02	858.63
Papua Barat	497.63	555.21	512.83	569.81	728.69

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Papua	1,305.62	2,047.83	1,457.09	2,318.53	1,957.47

Sumber: (Kemenkeu, 2023)

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir pajak diseluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan. Rasio pajak merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal secara luas dapat bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan, khususnya pertumbuhan yang inklusif (Jamil, 2017). Rasio pajak merupakan perbandingan dari jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang digunakan untuk menilai tingkat pembayaran pajak masyarakat (Setiabudi, 2017). Ketika sebuah *tax ratio* tinggi maka semakin tinggi juga penerimaan pajak dalam sebuah negara tersebut, yang nanti akan dapat mempermudah alokasi pembiayaan di negara tersebut, begitu pula sebaliknya. Namun, pajak belum mampu menurunkan Tingkat ketimpangan yang berada di Indonesia (Dricandita & Santoso, 2023).

Tabel 1.3 Subsidi Provinsi Indonesia (Miliar Rupiah)

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	8.47	8.33	6.27	3.93	19.94
Sumatera Utara	20.89	0.86	40.69	4.80	3.58
Sumatera Barat	14.54	2.65	6.73	24.68	24.84
Riau	21.83	39.65	33.38	29.63	31.69
Jambi	17.49	16.15	21.84	13.81	14.14
Sumatera Selatan	48.03	59.55	68.00	16.71	7.75
Bengkulu	0	0	0	0	0
Lampung	2.44	2.73	1	1.14	5.35
Kep. Bangka Belitung	0.52	0.63	1.55	1.86	3.94
Kep. Riau	0	1.67	4.31	0	1.69
DKI Jakarta	2,640.95	2,782.93	3,628.17	4,355.29	6,278.33
Jawa Barat	128.61	133.82	144.29	86.17	43.82
Jawa Tengah	1.41	1.51	11.2	3.33	10.83
DI Yogyakarta	0	76.07	78.04	73.32	72.26
Jawa Timur	185.31	32.05	30.28	10.82	27.03
Banten	0	7.4	5.43	33.19	36.85
Bali	15.34	15.07	6.06	0.02	5.64
Nusa Tenggara Barat	0	1.5	2.03	2.51	3.31

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0.5	0.14
Kalimantan Barat	0	0	0.52	0	9.35
Kalimantan Tengah	20.47	6.89	7.05	7.21	12.44
Kalimantan Selatan	0	0	0	0	1.06
Kalimantan Timur	4.81	3.98	0	12	0.26
Kalimantan Utara	26.25	32.13	35.09	24.75	26.06
Sulawesi Utara	2.56	3.05	0	0.06	3.75
Sulawesi Tengah	0.6	0.6	0.85	257.57	4.38
Sulawesi Selatan	8.54	1.9	1.94	36.33	5.64
Sulawesi Tenggara	8.57	6.45	0.03	58.69	0.07
Gorontalo	0	0	0	0.11	0.11
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
Maluku	16.26	23.05	29.22	27.65	19.62
Maluku Utara	2.29	6.49	0.69	3.65	8.75
Papua Barat	19.6	16.81	23.94	7.13	16.2
Papua	91.38	76.73	59.75	37.53	38.88

Sumber: (Kemenkeu, 2020)

Dalam table 1.3 di atas dapat diketahui terjadi kenaikan dan penurunan belanja subsidi yang cukup signifikan untuk 34 provinsi yang berada di Indonesia selama tahun 2018-2022. Besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja subsidi belum dapat untuk memberantas permasalahan ketimpangan yang terdapat di seluruh 34 Provinsi yang ada di Indonesia malah meningkatkan ketimpangan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dikeluarkan hingga Rp 502,4 triliun saat ini dinikmati paling banyak oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga ini akan membuat kesenjangan melebar (Putri, 2022).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan penelitian terkait dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia masih sulit untuk menghadapi ketimpangan tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik dalam meneliti

dampak dari kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam melengkapi penelitian yang terkait dengan dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap ketimpangan ekonomi, di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh subsidi terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh dari PDRB terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh simultan antara pajak, pengeluaran pemerintah, subsidi, dan PDRB terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pajak terhadap ketimpangan ekonomi.
2. Menganalisis pengeluaran pemerintah berdampak pada ketimpangan ekonomi.
3. Menganalisis subsidi yang diberikan memiliki pengaruh pada ketimpangan ekonomi.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh simultan antara pajak, pengeluaran pemerintah, subsidi dan PDRB terhadap ketimpangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Selain itu, memungkinkan peneliti untuk mendalami hubungan antara kebijakan fiskal terhadap ketimpangan regional, dan dapat memberikan pemahaman untuk peneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan ekonomi Tingkat provinsi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada Mahasiswa dan Akademisi mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, serta dapat membantu mahasiswa dan organisasi lainnya dalam memahami pentingnya kebijakan fiskal dalam menangani ketimpangan ekonomi di Indonesia, dan memberikan pengetahuan lebih dalam untuk mahasiswa mengenai kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan ekonomi

3. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini memungkinkan untuk pemerintah pusat menjadi saran agar memberikan instrument kebijakan fiskal yang baik untuk menurunkan Tingkat ketimpangan ekonomi, dan penelitian ini memungkinkan untuk memandu pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran yang lebih merata dan berkeadilan antar provinsi, sehingga dapat membangun Pembangunan yang lebih baik

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penulisan suatu karya ilmiah terutama sebuah skripsi pada dasarnya perlu menggunakan kajian literatur atau penelitian terdahulu sebagai dasar sebuah teori atau kesimpulan. Penelitian terdahulu dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti yang memiliki topik sama untuk melihat hasil serta implementasi yang bernilai informatif. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dasar termuat dalam uraian dan tabel di bawah ini:

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Alfirman et al., (2015) dalam penelitian tersebut menggunakan alat metode analisis berupa *Commitment to Equity* (CEQ) yang dimana metode ini menganalisis bagaimana pajak dan belanja publik yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak positif namun tidak terlalu berdampak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berhasil menurunkan indeks Gini dari 0,394 menjadi 0,370, serta mengurangi jumlah penduduk miskin dari 12,1% menjadi 10,5%. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa warga Indonesia tidak membayar pajak penghasilan dan 40% dari penduduk miskin terkena dampak dari pajak dan transfer. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal di Indonesia memiliki dampak positif namun tidak berdampak dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Azis et al., (2016) dalam penelitiannya ini meneliti tentang dampak kebijakan fiskal terhadap ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diteliti di salah satu kota di Jawa, penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai redistribusi kabupaten/kota bernilai negatif, hal ini dikarenakan redistribusi melalui pajak tidak efektif. Dalam praktiknya, sistem perpajakan yang berlaku cenderung memperlebar ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh

yang lebih besar pada daerah yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan daerah yang pendapatannya rendah pengaruhnya sangat kecil.

(Djirimu et al., 2021) meneliti tentang efek dari desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, pajak regional dan tenaga kerja terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif dan signifikan selama 5 tahun penerapan desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya, namun grafik dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya justru juga meningkatkan ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

(S et al., 2023) meneliti tentang hubungan antara kebijakan fiskal yang telah di implementasikan oleh pemerintah Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan fiskal terhadap Pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan yang menggunakan metode analisis regresi linear. Hasil yang ditemukan di penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari kebijakan fiskal dan efektivitasnya terhadap perekonomian regional, dengan menekankan pentingnya strategi fiskal yang disesuaikan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya Hardinandar, (2020) yang menggunakan metode AB-GMM dengan pendekatan Koyck. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan daya tampung fiskal dan dana transfer meningkatkan output perekonomian dan dapat menurunkan tingkat ketimpangan di pedesaan. Namun, dana bagi hasil pajak meningkatkan ketimpangan di daerah perkotaan dan menurunkan kemiskinan di pedesaan juga perkotaan. Kemudian, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memperparah kemiskinan di pedesaan tetapi di daerah perkotaan sebaliknya peran dana alokasi umum dapat menurunkan angka kemiskinan di perkotaan. Dalam perubahan jangka panjang ketimpangan jauh lebih cepat menurun di bandingkan kemiskinan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Keterangan (Judul Penelitian dan Nama Penelitian)	Hasil Penelitian dan Metode Analisis	Variabel Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015 (Hartini, 2017)	Penelitian untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2015. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa <i>cross section</i> 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta dan <i>time series</i> selama 2011-2015. Data diolah dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah • PDRB Per Kapita • Investasi • Indeks Pembangunan Manusia 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder serta metode analisis yaitu analisis data panel dengan regresi <i>Fixed Effect Model</i>	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, dan wilayah studi

		analisis data panel dengan regresi <i>fixed effect model</i> .			
2.	Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Arham, 2014)	Studi ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode ekonometrika melalui persamaan data panel pada periode tahun 2001–2010.	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Per Kapita • Jumlah Penduduk • Indeks Kemampuan Fiskal • Angka Pengangguran • Desentralisasi Fiskal 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder serta metode analisis yaitu analisis data panel.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, dan wilayah studi.
3.	Analisis Ketimpangan di Jawa Barat Tahun 2001-2017 (Nugroho, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk analisis factor yang mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat tahun 2001-2017, dengan menggunakan metode	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Gini • Pertumbuhan Ekonomi • Belanja Pemerintah • Subsidi • Pendapatan Asli Daerah 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, wilayah studi, dan metode analisis yang digunakan.

		<p>regresi berganda untuk membuktikan hipotesis, serta menganalisis variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Subsidi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 10 tahun, mulai dari tahun 2001 – 2017 yang di peroleh dari media informasi internet Badan Pusat Statistik, Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan Uji T, Uji F, R2 dan Asumsi Klasik.</p>		<p>digunakan yaitu berupa data sekunder.</p>	
4.	Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Trade-Off antara	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mencurigai adanya trade-off</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Head Count Index • Gini Ratio 	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang</p>	<p>Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel</p>

	<p>Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia</p> <p>(Hardinandar, 2020)</p>	<p>antara ketimpangan dan kemiskinan akibat dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat oleh Provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode AB-GMM dengan pendekatan Koyck untuk mendeteksi hal tersebut pada 32 provinsi di Indonesia sejak tahun 2010-2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB 	<p>dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder.</p>	<p>penelitian, wilayah studi, dan metode analisis yang digunakan.</p>
5.	<p>Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Antar Daerah</p> <p>(Latifah & Rahayu, 2019)</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang diproksi dari total dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan antar daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan antar Daerah • Desentralisasi Fiskal • Pertumbuhan Ekonomi 	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder.</p>	<p>Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, wilayah studi, dan metode analisis yang digunakan</p>

		penelitian ini berupa data sekunder dengan kurun waktu 12 tahun (<i>time series</i>).			
6.	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara) (Simonsen, 2011)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara selama lima tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2004-2008. Metode analisis penelitian ini menggunakan persamaan model simultan berulang (<i>Recursive Model</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah • Ketimpangan Wilayah • Desentralisasi Fiskal • Tenaga Kerja • Pajak Daerah • Aglomerasi 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, wilayah studi, dan metode analisis yang digunakan.

7.	Ketimpangan antar wilayah dan Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia (Nasution, 2020)	Penelitian ini mengkaji perkembangan ketimpangan antar wilayah di Indonesia dari tahun 2010-2019. Pengujian dilakukan dengan pengelompokan menggunakan tipologi Klassen dan mengukur nilai ketimpangan menggunakan Indeks Williamson.	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Per Kapita • Pertumbuhan PDRB Provinsi • Jumlah Penduduk Tiap Provinsi • Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, wilayah studi, dan metode analisis yang digunakan.
8.	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur) (Harun & Maski, 2013)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Ketimpangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson) • Pengeluaran Pemerintah Daerah • Pertumbuhan Ekonomi 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder serta metode analisis yaitu analisis data panel.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, dan wilayah studi.

		pembangunan wilayah sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan metode pengukuran Indeks Williamson.			
9.	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013 (Nurlaili, 2006)	Penelitian ini bertujuan untuk tolak ukur melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2007-2013. Penelitian ini merupakan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Ketimpangan Distribusi Pendapatan • PDRB Per Kapita • Populasi Penduduk • Tingkat Pengangguran Terbuka • Desentralisasi Fiskal 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder serta metode analisis yaitu analisis data panel dengan regresi <i>Fixed Effect Model</i> .	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian, dan wilayah studi.

		kuantitatif. Data yang digunakan berupa <i>cross section</i> 6 provinsi se Jawa dan <i>time series</i> selama 2007-2013. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi <i>fixed effect model</i> .			
10.	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Ridho, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder 34 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan adalah data panel.	<ul style="list-style-type: none"> • Gini Ratio • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Dana Bagi Hasil Pajak • Pertumbuhan Ekonomi 	Persamaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan ialah berupa jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder, metode analisis yaitu analisis data panel dengan regresi <i>Fixed Effect Model</i> , dan wilayah studi	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yaitu berupa variabel penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan atau disparatis antar daerah adalah hal yang wajar terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini dikarenakan perbedaan dari sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang berada pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh sebab itu di setiap daerah memiliki daerah maju (*Developed Region*) dan daerah terbelakang (*Undeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012).

Menurut (Kuncoro, 2006), ketimpangan mengarah kepada standar hidup yang relatif pada seluruh Masyarakat. Perbedaan ini yang menyebabkan Tingkat Pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda, sehingga memunculkan gap atau jarak kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Selain itu, ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang biasanya di hadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia.

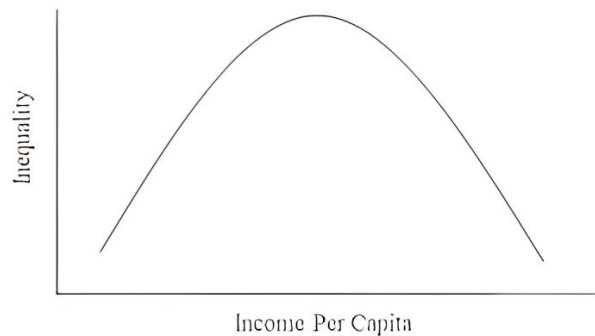
Ketimpangan antar wilayah diciptakan oleh Douglas C. North di dalam Analisa-nya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut di wujudkan sebuah prediksi hubungan antara Tingkat Pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan Pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada saat awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan Pembangunan yang terjadi antar wilayah secara signifikan mengalami peningkatan. Proses ini akan terus-menerus terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik atas. Kemudian, apabila proses Pembangunan ini berlanjut secara terus-menerus ketimpangan Pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, dapat dikatakan bahwa negara-negara berkembang umumnya mengalami tingkat kesenjangan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara industri. Hal ini karena negara-negara maju, yang memiliki infrastruktur yang memadai atau substansial, cenderung tidak mengalami pembangunan signifikan dibandingkan negara-negara miskin.

Simon Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi ini yang kemudian

dapat dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena adanya perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan.

Gambar 2.1 Kurva Kuznet



Sumber: Todaro dan Smith, 2014

1. Pengukuran Distribusi Pendapatan menurut World Bank

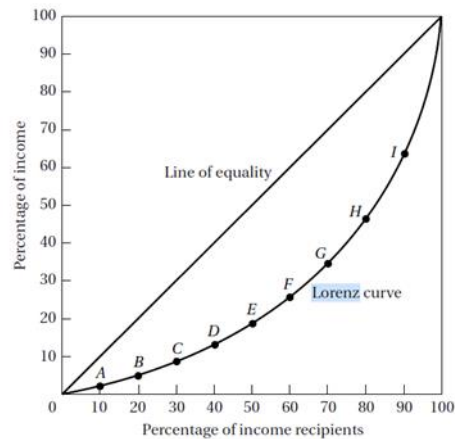
World Bank (Bank Dunia) menerapkan standar mengenai distribusi pendapatan dengan mempertimbangkan pendapatan 40% penduduk berpenghasilan rendah. Bank Dunia membagi populasi ke dalam tiga kelompok, mengalokasikan 40% masing-masing kelompok untuk Masyarakat berpendapatan rendah dan menengah serta 20% untuk Masyarakat berpendapatan tinggi.

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) ketimpangan distribusi dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Dikategorikan Tingkat ketimpangan berat jika sebesar 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- b. Dikategorikan Tingkat ketimpangan sedang jika sebesar 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- c. Dikategorikan Tingkat ketimpangan rendah jika sebesar 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17% dari pendapatan nasional.

2. Kurva Lorenz

Gambar 2.2 Kurva Lorenz



Sumber: Todaro (2011)

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan Masyarakat. Kurva ini terdapat didalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya menunjukkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya menunjukkan persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat dengan diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, namun jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin melengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk yang membuat distribusi pendapatan semakin menimpang dan tidak merata.

3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan menjadi salah satu indikator yang paling umum dalam mengukur ketimpangan di suatu negara. Rasio gini memiliki rentang antara nol hingga satu. Jika nilai indeks gini mendekati nol maka memperlihatkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi (Todaro & Smith, 2006a). Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

2.2.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan sebuah konsep pengelolaan ekonomi yang di perkenalkan oleh John Maynard Keynes. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara

sebenarnya punya hak untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menggunakan pajak dan membuat kebijakan dengan tujuan ekonomi tertentu.

Menurut (Mankiw, 2013), Kebijakan Fiskal adalah Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Sedangkan menurut Nopirin (1987), kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa digunakan ialah budget defisit yaitu selisih antara pengeluaran pemerintah dan juga pembayaran transfer dengan penerimaan dari pajak. *Fiscal Policy* atau Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk menuju arah perekonomian yang lebih baik atau sesuai dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Latifah & Rahayu, 2019).

Menurut (Sudirman, 2011), instrument utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak yang dimana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah dan tidak ada mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Menurut (Mangun, 2011), Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian yang lebih baik.

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, melalui *Indische Comptabiliteitswet* tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian berkembang oleh pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai dari proklamasi sampai tahun 1997-2003. Setelah tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada Analisa perekonomian negara yang berlandaskan UUD 1945. Pihak yang memiliki kuasa dalam membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Presiden.

1. Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara

Penerapan kebijakan fiskal ini diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah yang ada di dalam-nya.

b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Apabila kualitas dari SDM meningkat maka harapannya SDM tersebut mempunyai kemampuan untuk bersaing di dunia kerja baik nasional maupun internasional.

c. Menjaga Stabilitas Harga Barang

Salah satu alasan tujuan adanya kebijakan fiskal yaitu agar dapat menjaga stabilitas harga barang agar tidak terjadinya monopoli dipasar.

d. Mendorong Investasi

Untuk menciptakan suasana investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

2. Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Dari Segi Teoritis

Dari segi teoritis di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu:

i. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang.

ii. Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana

Untuk menghadapi masalah tertentu, seperti pandemi dan krisis ekonomi yang dimana kebijakan fiskal ini ia memanipulasi anggaran negara.

iii. Kebijakan Fiskal yang Tidak Disengaja/Insidental

Kebijakan fiskal ini berupa penetapan Keputusan/aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah.

b. Dari Segi Penerapan

Dari segi penerapan/implementasinya ada dua, yaitu:

i. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini diambil pemerintah Ketika kondisi ekonomi negara melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi dari kebijakan ekspansif yaitu demi meningkatkan daya beli barang, sehingga Perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja

ii. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan ini menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini

c. Dari Segi Neraca Pembayaran

Dari segi neraca pembayaran terbagii menjadi empat, yaitu:

i. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko yang besar, karena tidak semua negara punya kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga

ii. Kebijakan Fiskal Surplus

Jenis kebijakan ini digunakan Ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Fungsinya yaitu untuk mencegah terjadinya inflasi.

iii. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran.

iv. Kebijakan Fiskal Dinamis

Jenis Kebijakan Fiskal ini yaitu digunakan Ketika sewaktu-waktu negara membutuhkan

2.2.3 Pajak

Pajak adalah kewajiban iuran kepada negara yang harus dipatuhi menurut peraturan, dengan tidak mengharapkan imbalan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dikerjakan oleh pemerintahan (Verawati, 2019). Menurut Prof. Dr. Rachmat Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada negara (perpindahan kekayaan dari rakyat ke

pemerintah) berdasarkan undang-undang untuk membiayai kegiatan rutin dan yang lebih dapat digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dari biaya untuk *public investment*.

Menurut (Riftiasari, 2019), Pajak ialah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak mengikuti berdasarkan lembaganya dan pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019) terdapat beberapa fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran (*Budgetair*) dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pengeluarannya, kedua fungsi mengatur (*Regulerend*) ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, ketiga fungsi stabilitas untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga agar inflasi dapat di kendalikan, dan keempat fungsi redistribusi pendapatan dimana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Pendapatan negara berasal dari warga negaranya melalui pembayaran pajak, dan/atau dari sumber daya alam yang ada di dalam wilayah negara tersebut (Sumber Daya Alam). Kedua sumber tersebut adalah sumber utama yang mendatangkan pendapatan bagi negara, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum termasuk kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh dari pajak itu kemudian digunakan lagi untuk memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat melalui pengeluaran reguler dan pembangunan, tanpa memandang apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak.

2.2.4 Subsidi

Subsidi adalah sebuah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintahan yang diberikan kepada Masyarakat, Yayasan atau komunitas tertentu. Menurut Milton, H Spencer dan Orley M. Amos, Jr. didalam bukunya yang berjudul "*Contemporary Economics*", menjelaskan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud untuk mencapai tujuan.

Menurut (Nazir, 2004) subsidi adalah sebuah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk produsen, distributor dan konsumen dalam bidang tertentu untuk membantu sebuah kegiatan usaha atau kegiatan perorangan oleh pemerintah. Selain itu menurut (Hasanuddin & Nazir, 2004) menyatakan bahwa subsidi bisa mendorong peningkatan output produk-produk yang dibantu akan tetapi dapat mengganggu alokasi sumber daya domestic secara umum dan memberikan dampak yang bisa merugikan terhadap perdagangan internasional.

Menurut (Nazir, 2004) ada beberapa tujuan dari subsidi, yaitu:

- i. Subsidi Produksi
Pemberian subsidi untuk para produsen oleh pemerintah untuk meningkatkan output dari produk tertentu yang tujuannya untuk memperluas produksi beberapa produk dengan harga rendah untuk barang yang dianggap penting.
- ii. Subsidi Ekspor
Pemberian subsidi oleh pemerintah untuk produk yang di ekspor atau ekspor secara umum, sebagai suatu alat untuk membantu neraca pembayaran negara, dan juga subsidi ekspor ini diberikan sebagai Upaya peningkatan perdagangan.
- iii. Subsidi Pekerjaan
Pemberian subsidi berupa upah yang diberikan oleh pemerintah sebagai suatu insentif pada Perusahaan untuk dapat memberi lebih banyak kesempatan kerja, sehingga dapat menurunkan Tingkat pengangguran di negara.
- iv. Subsidi Pendapatan
Pemberian subsidi pada Masyarakat melalui sistem pembayaran transfer pemerintah dalam usaha untuk memungkinkan Masyarakat menikmati suatu standar hidup minimum. Subsidi pendapatan diberikan oleh pemerintah agar kesejahteraan Masyarakat terjamin, sehingga perekonomian yang diinginkan dapat lebih lanjut.

2.2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur pergerakan perekonomian

dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, hal ini terlihat di dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja, dan memancing atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010). (Djaenuri, 2012), menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah.

Pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari tahun ke tahun di negara berkembang karena menjalankan fungsi sebagai *Agent of Development* dan sejalan pula dengan peningkatan ekonomi suatu negara. Ada tiga faktor yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni: 1) Peningkatan kebutuhan terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan; 2) Peningkatan penyediaan (Supply) layanan pemerintah dari penerima layanan; 3) Meningkatnya ketidakefektifannya pemberian layanan. Dari penjelasan tersebut, pemerintah berkewajiban memperoleh penerimaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan pengeluaran pemerintah.

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu yang merupakan tanda wajib guna mengenali keadaan ekonomi disuatu daerah/regional dalam suatu masa tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik menurut ketentuan harga berlaku dan harga konstan. PDRB pada umumnya adalah seluruh nilai tambah yang didapatkan dari segala unit usaha dalam sesuatu daerah tertentu, atau menggambarkan seluruh nilai barang serta jasa akhir yang di dapatkan dari segala instrumen ekonomi. Guna membentuk PDRB dipakai dua pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyediakan bahan-bahan informasi nilai tambah dirinci bagi sumber aktifitas ekonomi serta bagi unsur kegunaannya. PDRB dari bidang lapangan usaha ialah suatu penjumlahan dari segala unsur nilai tambah bruto yang dapat dibuat dari lapangan usaha atas berbagai kegiatan produksinya. Sebaliknya, dari bidang penggunaan menjelaskan atas pemakaian dari nilai tambah tersebut.

Pembangunan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi

pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pertumbuhan ekonominya (Majid, 2018).

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), kedua, pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran /*expenditure*), dan ketiga pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Secara prinsip ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sesuai dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama juga dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah mencakup pajak lainnya atas produksi neto.

2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Independen

2.3.1 Hubungan Antara Pajak dengan Ketimpangan

Menurut Carter dan Matthews menyatakan bahwa kebijakan pajak memiliki peranan yang penting dalam Upaya untuk menurunkan ketimpangan dengan cara meningkatkan distribusi kekayaan melalui peningkatan transfer baik melalui pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan infrastruktur maupun melalui bantuan tunai, Carter dan Matthews juga menambahkan bahwa perpajakan yang progresif merupakan jalan bagi pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan (Maftuchan, 2014).

Meskipun demikian, dalam kebijakan dan pelaksanaan perpajakan tidak terlepas dari persoalan tersebut. Pengalaman praktik pajak di beberapa negara menunjukkan bahwa pajak dapat menjadi sumber atau penyebab ketimpangan. Kelompok masyarakat yang sangat kaya sebenarnya membayar pajak lebih sedikit daripada masyarakat kaya atau menengah karena tarif yang diterapkan lebih rendah. Melalui distribusi yang merata dan akumulatif, pajak yang ada dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat melalui program sosial atau sejenisnya untuk mengurangi ketimpangan (Maftuchan, 2014).

2.3.2 Hubungan Antara Subsidi dengan Ketimpangan

Subsidi merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal yang mampu untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Program dari subsidi ini memiliki rata-rata dampak terbesar dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan seperti program subsidi LPG, subsidi pupuk, subsidi Listrik, dan subsidi pupuk (Kurnaini et al., 2021).

Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) malah dinikmati paling banyak oleh Masyarakat kelas menengah keatas, sehingga hal ini dapat membuat kesenjangan melebar (Putri, 2022).

2.3.3 Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan

Pentingnya peran sistem perekonomian dalam suatu wilayah atau negara menuntut pemerintah untuk terlibat dalam semua aspeknya, termasuk pengelolaan barang dan jasa publik, alokasi barang produksi dan konsumsi, perbaikan distribusi perdagangan, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Suparmoko, 2011).

Ketimpangan pasti memiliki efek baik dan efek buruk. Keuntungan dari ketimpangan adalah bisa mendorong daerah kurang maju untuk bersaing dan tumbuh demi meningkatkan kesejahteraannya. Dampak buruk dari ketimpangan yang ekstrim meliputi inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi dianggap tidak adil secara umum (Todaro & Smith, 2006b).

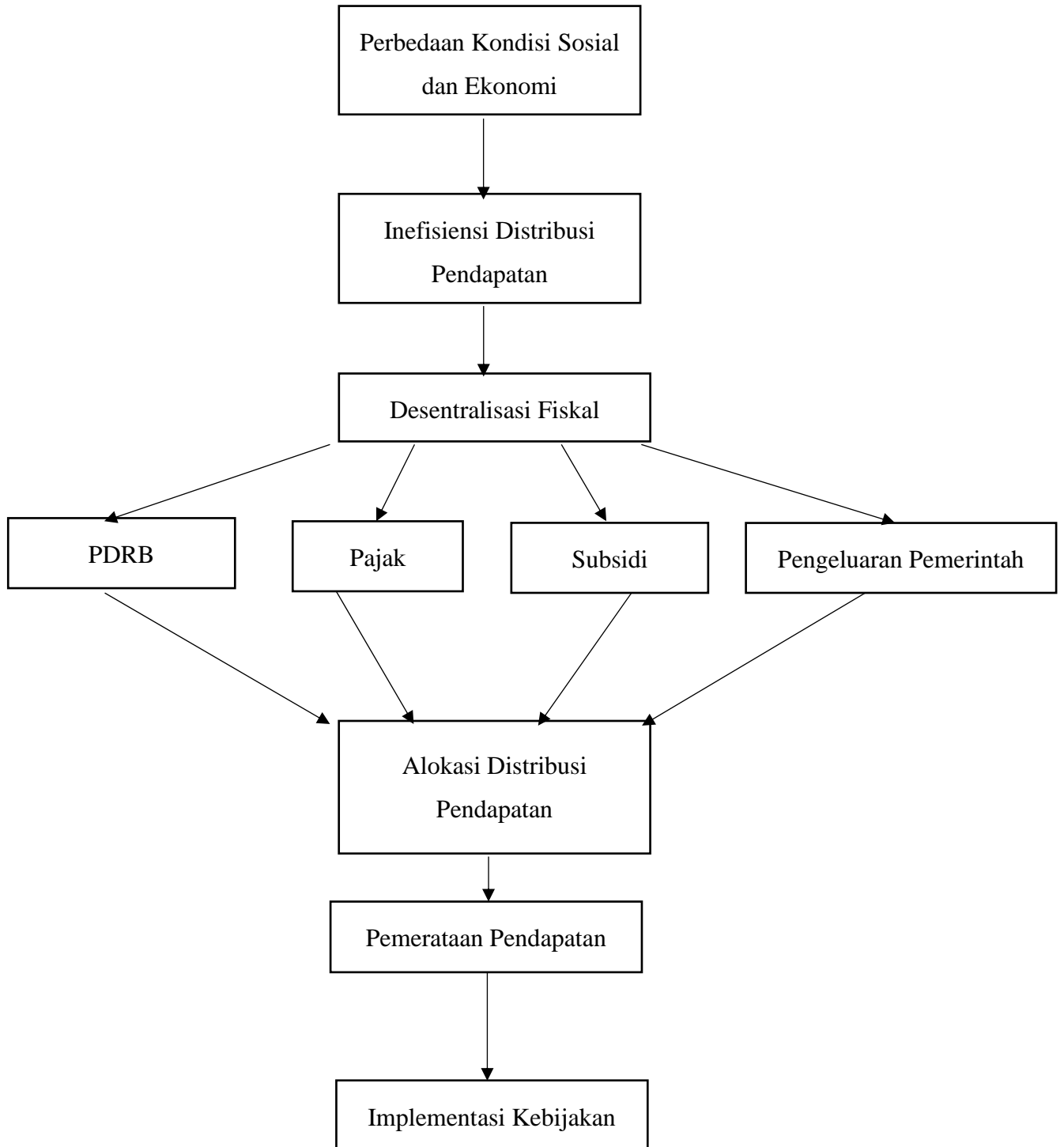
2.3.4 Hubungan Antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan

PDRB merupakan salah satu indikator yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (1 tahun) yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara ataupun suatu daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu (Mangundap et al., 2024).

Tinggi dari sebuah PDRB mencerminkan kesuksesan suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan akan sumber daya yang dimiliki dan tersedia sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Namun di beberapa negara yang sedang berkembang selalu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mencapai sebuah pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada waktu tertentu kemudian mengalami penurunan pada suatu tingkat tertentu (Arsyad, 2010).

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

1. Diduga bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi.
2. Diduga bahwa subsidi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi.
3. Diduga bahwa besaran pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi.
4. Diduga bahwa besaran PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi.
5. Diduga bahwa secara simultan variabel pajak, pengeluaran pemerintah, subsidi, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung di dapat tetapi melalui pihak ketiga. Sumber data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022, sedangkan data cross section terdiri dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Data Indeks Gini Ratio di seluruh Provinsi Indonesia tahun 2018-2022
2. Data Pajak seluruh Provinsi Indonesia dari tahun 2018-2022
3. Data Subsidi seluruh Provinsi Indonesia dari tahun 2018-2022
4. Data Pengeluaran Pemerintah Indonesia dari tahun 2018-2022
5. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2018-2022

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Adapun operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi sebuah akibat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Indeks Gini Ratio.

Indeks Gini (gini ratio) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna (Satu Data Kediri, n.d.).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independent adalah variable yang menjadi sebab atau variable yang mempengaruhi variable dependen. Adapun variable independent didalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak

Dalam penelitian ini mengambil data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dari tahun 2018-2022, menggunakan data pajak dengan satuan Milyar rupiah

2. Subsidi

Dalam penelitian ini mengambil data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dari tahun 2018-2022, menggunakan data subsidi dengan satuan Milyar rupiah

3. Pengeluaran Pemerintah

Dalam penelitian ini mengambil data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dari tahun 2018-2022, menggunakan data pengeluaran pemerintah dengan satuan Milyar Rupiah

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penelitian ini mengambil data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) dari tahun 2018-2022, menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan satuan Milyar rupiah

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Data panel merupakan penggabungan data antara *time series* dan *cross section*. Alat yang dipakai yaitu Eviews 12. Adapun *cross section* yaitu seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.

Menurut (Widarjono, 2007), data panel memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan data *cross section* atau *time series*. Data panel menyajikan data yang lebih banyak sehingga *degree of freedom* yang dihasilkan lebih besar. Hal ini terjadi karena gabungan antara data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang muncul ketika variable dihilangkan. Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan:

Y	: Gini Ratio (Persen %)
X ₁	: Pajak (Milyar Rupiah)
X ₂	: Subsidi (Milyar Rupiah)
X ₃	: Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rupiah)
X ₄	: PDRB (Milyar Rupiah)
β ₀	: Konstanta/Intercept
β ₁ β ₂ β ₃ β ₄	: Koefisien regresi variabel independen
e	: Komponen Error
i	: 34 Provinsi Indonesia
t	: Tahun 2018-2022

Menurut Widarjono (2013), metode panel mempunyai tiga model pendekatan:

3.3.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) ialah model yang paling sederhana. Metode ini dibidang sederhana dikarenakan hanya menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model ini yaitu *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun intercept/konstanta pada masing masing koefisien sama dalam model. Tidak hanya itu, slope koefisien dalam data *cross section dan time series* juga sama.

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini merupakan suatu model regresi data panel yang memperoleh intercept yang berbeda-beda pada setiap unit cross section. Akan tetapi slope koefisien masih sama. Estimasi model yang digunakan yaitu *Least Square Dummy Variable*. Adapun model fixed effect sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{26} D_{26} + e_{it}$$

3.3.3 Random Effect Model (REM)

Model ini merupakan model yang dapat mengurangi degree of freedom sehingga mengurangi efisien dari parameter yang di estimasi. Dalam model ini terdapat perbedaan di Intercept. Keuntungan dari model ini yaitu dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini bisa disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM). Adapun model random effect sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \alpha_1 D_1 + \dots + \alpha_{26} D_{26} + \epsilon_i + e_{it}$$

3.4 Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Pada analisis model regresi data panel mempunyai tiga model yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam menggunakan model tersebut dibutuhkan kriteria untuk pengujian agar mampu menentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Untuk memilih model yang tepat maka perlu pengujian yang harus dilakukan yaitu, sebagai berikut:

3.4.1 Uji Chow

Uji chow ini berfungsi untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dalam mengestimasi data panel. Berikut ini hipotesisnya:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika H_0 diterima maka hasil uji yang terbaik adalah CEM sebaliknya jika H_0 ditolak maka hasil uji terbaik diantara keduanya adalah FEM dan perlu melanjutkan ke uji REM untuk menentukan hasil akhir model terbaik (Widarjono, 2007).

3.4.2 Uji Hausman

Uji hausman berfungsi untuk memilih model yang tepat antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi maka menerima H_0 . Dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika H_0 diterima maka merepresentasikan bahwa model yang terbaik adalah REM jika hasil yang didapatkan sebaliknya maka hasil terbaik yang diinterpretasikan adalah FEM (Widarjono, 2007).

3.4.3 Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji ini merupakan pengujian yang berfungsi untuk menentukan model yang tepat *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* dalam mengestimasi data panel. Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Apabila nilai dari probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka menolak H_0 . Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi tingkat menerima H_0 yang dimana menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika H_0 diterima maka hasil uji terbaik untuk model CEM sebaliknya jika H_0 ditolak maka hasil uji terbaik yaitu REM untuk uji FEM perlu dilanjutkan jika ingin menentukan hasil akhir model terbaik (Widarjono, 2007).

3.5 Pengujian Hipotesis

Menurut (Widarjono, 2007) berikut ini merupakan pengujian hipotesis yang akan dilakukan sebagai berikut:

3.5.1 Koefisien Regresi Bersama (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variable independent berpengaruh secara Bersama-sama terhadap variable dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka menerima hipotesis H_1 maka dapat diartikan bahwa variable independent tersebut mempunyai pengaruh terhadap variable dependen secara simultan. Ketika H_0 menolak maka F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel yang artinya variable independent tidak memengaruhi variable dependen secara simultan. Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

H_1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, yang artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.5.2 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T ini digunakan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh antara variabel dependen dengan variable independen secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai P-Value lebih kecil α maka terdapat pengaruh

variabel dependen terhadap variabel independen. Namun, jika nilai P-value lebih besar dari α maka tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hipotesis uji T dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak terhadap tingkat ketimpangan ekonomi
 $H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara pajak terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_1: \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara pajak terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
2. Pengaruh Subsidi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara subsidi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_1: \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara subsidi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_1: \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
4. Pengaruh PDRB terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh antara PDRB terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.
 $H_1: \beta < 0$, terdapat pengaruh negatif antara PDRB terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini berfungsi untuk mengukur persentase dari total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Apabila R^2 semakin tinggi maka dapat memperjelas hubungan antara variabel dependen dan independen. Namun, apabila R^2 semakin rendah maka tidak dapat memperjelas hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini berisi data-data statistic. Adapun data statistic dalam penelitian ini terdiri dari mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Berikut ini olahan data dari statistic deskriptif yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Deskriptif	Gini Ratio (Persen)	Pajak (Miliar Rupiah)	Subsidi (Miliar Rupiah)	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)	PDRB (Miliar Rupiah)
Mean	0.347645	5856.511	134.0499	33181.32	43489.10
Maksimum	0.459000	40298.12	6278.330	132262.5	182908.7
Minimum	0.247000	350.5200	0.00000	7533.810	12273.85
Standar Deviasi	0.039455	8783.711	704.8522	29126.79	32465.82

Sumber: data diolah dari Eviews 12 (2024)

Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 169 data penelitian. Pada tahun 2018-2022 tingkat gini ratio di seluruh Provinsi Indonesia secara rata-rata yaitu sebesar 34,76% dengan tingkat gini ratio terendah di seluruh provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar 24,7%. Adapun tingkat gini ratio tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 45,9%, dengan standar deviasi sebesar 0,039455 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Rata-rata pajak yang didapati seluruh Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2018-2022 sebesar Rp 5.856,511 Miliar, pajak tertinggi yang terjadi di seluruh Provinsi Indonesia terletak di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 40.298,12 Miliar. Adapun daerah dengan pajak terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 350,5200 Miliar, dengan standar deviasi sebesar 8.783,711.

Belanja subsidi yang terjadi seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022 rata-ratanya sebesar Rp 134,0499 Miliar dengan belanja subsidi tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 6.278,330 Miliar. Sementara itu belanja subsidi terendah sebesar Rp 0,00000 Miliar karena pemerintah provinsi tersebut tidak membelanjakannya, dengan standar deviasi sebesar 704,8522.

Pengeluaran Pemerintah yang dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022 secara rata-rata sebesar Rp 33.181,32 Miliar. Pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 132.262,5 miliar pada tahun 2022. Adapun daerah dengan pengeluaran pemerintah terendah sebesar Rp 7.533,810 miliar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018, dengan standar deviasi sebesar 29.126,79.

PDRB di seluruh Provinsi Indonesia dalam kurun waktu 2018-2022 secara rata rata sebesar Rp 43.489,10. Jumlah PDRB terbesar yang terjadi di Indonesia saat ini terletak di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 182.908,7 pada tahun 2022. Adapun daerah provinsi dengan pdrb terendah yang hanya sebesar Rp 12.273,85 yang terjadi pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan standar deviasi sebesar 32465,82.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan

Adapun metode regresi pada data panel ini yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk menentukan model yang tepat digunakan beberapa uji yaitu uji Chow, uji LM, dan uji Hausman.

4.2.1 Common Effect Model

Adapun hasil regresi data panel menggunakan metode model *Common Effect* yang ditampilkan pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.351846	0.007148	49.22498	0.0000
TAX	1.58E-06	9.41E-07	1.681079	0.0947
SUB	1.20E-05	7.24E-06	1.663975	0.0980
GEXP	-3.81E-08	2.30E-07	-0.165669	0.8686
PDRB	-3.18E-07	1.21E-07	-2.625283	0.0095
R-squared	0.156365	F-statistic		7.599193
Adjusted R-squared	0.135788	Prob(F-statistic)		0.000012

Sumber: data diolah dari Eviews 12 (2024)

4.2.2 Fixed Effect Model

Adapun hasil regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect* ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.391666	0.016813	23.29493	0.0000
TAX	2.92E-07	8.61E-07	0.338908	0.7352
SUB	9.40E-06	3.45E-06	2.723807	0.0073
GEXP	-5.48E-07	5.06E-07	-1.082942	0.2808
PDRB	-6.62E-07	3.46E-07	-1.913711	0.0578
R-squared	0.953744	F-statistic		73.00116
Adjusted R-squared	0.940679	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: data diolah dengan Eviews 12 (2024)

4.2.3 Random Effect Model

Adapun hasil regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* ditampilkan pada table 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.360143	0.012240	29.42282	0.0000
TAX	6.09E-07	7.60E-07	0.801383	0.4241
SUB	9.37E-06	3.30E-06	2.837443	0.0051
GEXP	-9.81E-09	2.71E-07	-0.036159	0.9712
PDRB	-3.86E-07	1.92E-07	-2.014547	0.0456
R-squared	0.057284	F-statistic		2.491347
Adjusted R-squared	0.034291	Prob(F-statistic)		0.045176

Sumber: data diolah dari Eviews 2022 (2024)

4.3 Pemilihan Model Terbaik

4.3.1 Uji Chow

Adapun hasil pemilihan uji regresi data panel dengan menggunakan model common effect dan fixed effect dengan menggunakan uji Chow ditampilkan dalam Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	68.430661	(33,131)	0.0000
Cross-section Chi-square	490.695131	33	0.0000

Sumber: diolah melalui Eviews 2012 (2024)

H0: Common Effect

H1: Fixed Effect

Berdasarkan nilai output di atas, didapatkan nilai Prob *Cross Section* F sebesar $0,0000 < \alpha 5\%$. Hal ini bermakna bahwa menolak H0, sehingga didapatkan model terbaik adalah *Fixed Effect*.

4.3.2 Uji Hausman

Adapun hasil pemilihan uji regresi data panel dengan menggunakan model *random effect* dan *fixed effect* dengan menggunakan uji hausman ditampilkan dalam Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.843734	4	0.0975

Sumber: diolah melalui Eviews 12 (2024)

H0: *Random Effect*

H1: *Fixed Effect*

Berdasarkan output di atas, didapatkan nilai Prob cross section random sebesar 0,0975 < alfa 10%. Hal ini bermakna bahwa kita menolak H0, sehingga didapatkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.7 Hasil Uji Terbaik

Uji F (Uji Chow)	Uji Hausman	Uji LM	Model Data Panel Terbaik
Fixed Effect	Fixed Effect	Random Effect	Fixed Effect

4.4 Interpretasi Model Terbaik

Adapun model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel yaitu menggunakan *Fixed Effect Model* yang ditampilkan dalam table 4.9 berikut ini:

Tabel 4.8 Regresi Data Panel Model Terbaik: Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.391666	0.016813	23.29493	0.0000
TAX	2.92E-07	8.61E-07	0.338908	0.7352
SUB	9.40E-06	3.45E-06	2.723807	0.0073

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GEXP	-5.48E-07	5.06E-07	-1.082942	0.2808
PDRB	-6.62E-07	3.46E-07	-1.913711	0.0578
R-squared	0.953744	F-statistic		73.00116
Adjusted R-squared	0.940679	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: data diolah melalui Eviews12 (2024)

4.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0,$$

(Seluruh variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen)

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0,$$

(Seluruh variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen)

Berdasarkan output di atas, didapatkan nilai Prob F sebesar $0,0000 < \alpha 5\%$. Hal ini bermakna bahwa menolak H_0 , sehingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen.

4.4.2 Uji Statistik (Uji T)

1. Variabel Tax (Pajak)

$$H_0: \beta_1 = 0,$$

Secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen atau tidak ada pengaruh antara pajak terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

Secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau ada pengaruhnya antara pajak terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan output di atas, didapatkan nilai Prob t sebesar $0,7352 > \alpha 5\%$. Hal ini bermakna bahwa gagal menolak H_0 , sehingga didapat kesimpulan bahwa secara parsial variabel pajak tidak mempengaruhi variabel gini ratio.

2. Variabel Sub (Subsidi)

H0: $\beta_2 = 0$,

Secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen atau tidak ada pengaruh antara subsidi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

H1: $\beta_2 \neq 0$

Secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau ada pengaruh antara subsidi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan output di atas, didapatkan nilai Prob t sebesar $0,0073 < \alpha 5\%$. Hal ini bermakna bahwa menolak H0, sehingga didapat kesimpulan bahwa secara parsial variabel subsidi berpengaruh positif terhadap variabel gini ratio.

3. Variabel Gexp (Pengeluaran Pemerintah)

H0: $\beta_3 = 0$,

Secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen atau tidak ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

H1: $\beta_3 \neq 0$

Secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan output di atas, didapatkan nilai Prob t sebesar $0,2808 > \alpha 5\%$. Hal ini bermakna bahwa gagal menolak H0, sehingga didapat kesimpulan bahwa secara parsial variabel pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi variabel gini ratio.

4. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

H0: $\beta_4 = 0$,

Secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen atau tidak ada pengaruh antara PDRB terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

H1: $\beta_4 \neq 0$,

Secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau ada pengaruh antara PDRB terhadap tingkat ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan output di atas, didapatkan nilai Prob F sebesar $0,0578 < \alpha 10\%$. Hal ini bermakna bahwa menolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap variabel gini ratio.

4.4.3 Uji Kebaikan Regresi (R^2)

Berdasarkan output di atas didapatkan nilai R-Squared sebesar 0.953744 atau 95,37%. Hal ini bermakna sebesar 95,37% model tersebut dijelaskan oleh variabel pajak, subsidi, pengeluaran pemerintah, dan pdrb. Sedangkan 4,62% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4.4 Interpretasi Persamaan Regresi

$$\text{Gratio it} = \beta_0 + \beta_1 \text{ tax it} + \beta_2 \text{ sub it} + \beta_3 \text{ gexp it} + \beta_4 \text{ pdrb it} + \text{eit}$$

$$\text{Gratio it} = 0,391666 + 2.920000000000007 \text{ tax it} + 9,400000000000006 \text{ sub it} - 5,480000000000007 \text{ gexp it} - 6,620000000000007 \text{ pdrb it}$$

Interpretasi masing – masing variabel, antara lain:

1. Intersept (C).

Hal ini bermakna apabila variabel Pajak, Subsidi, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB bernilai, maka gini ratio bernilai 0,391666

2. Tax (Pajak)

Hal ini bermakna apabila terjadi peningkatan pajak sebesar seribu rupiah, maka tidak akan mempengaruhi gini ratio secara signifikan. Dengan kata lain, pajak tidak memiliki pengaruh dengan gini ratio.

3. Sub (Subsidi)

Hal ini bermakna apabila terjadi peningkatan subsidi sebesar seribu rupiah, maka gini ratio akan meningkat sebesar 9,400000000000006.

4. Gexp (Pengeluaran Pemerintah)

Hal ini bermakna apabila terjadi peningkatan pendidikan sebesar seribu rupiah, maka tidak akan mempengaruhi gini ratio secara signifikan. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan dengan gini ratio.

5. PDRB

Hal ini bermakna apabila terjadi peningkatan pdrb sebesar seribu rupiah, maka gini ratio akan penurunan sebesar 6,62000000000007.

4.5 Analisis Cross Section Effect pada Model Terbaik

Adapun hasil analisis Cross Section Effect uji pada model terbaik yaitu Fixed Effect Model ditampilkan dalam Tabel 4.10 berikut ini:

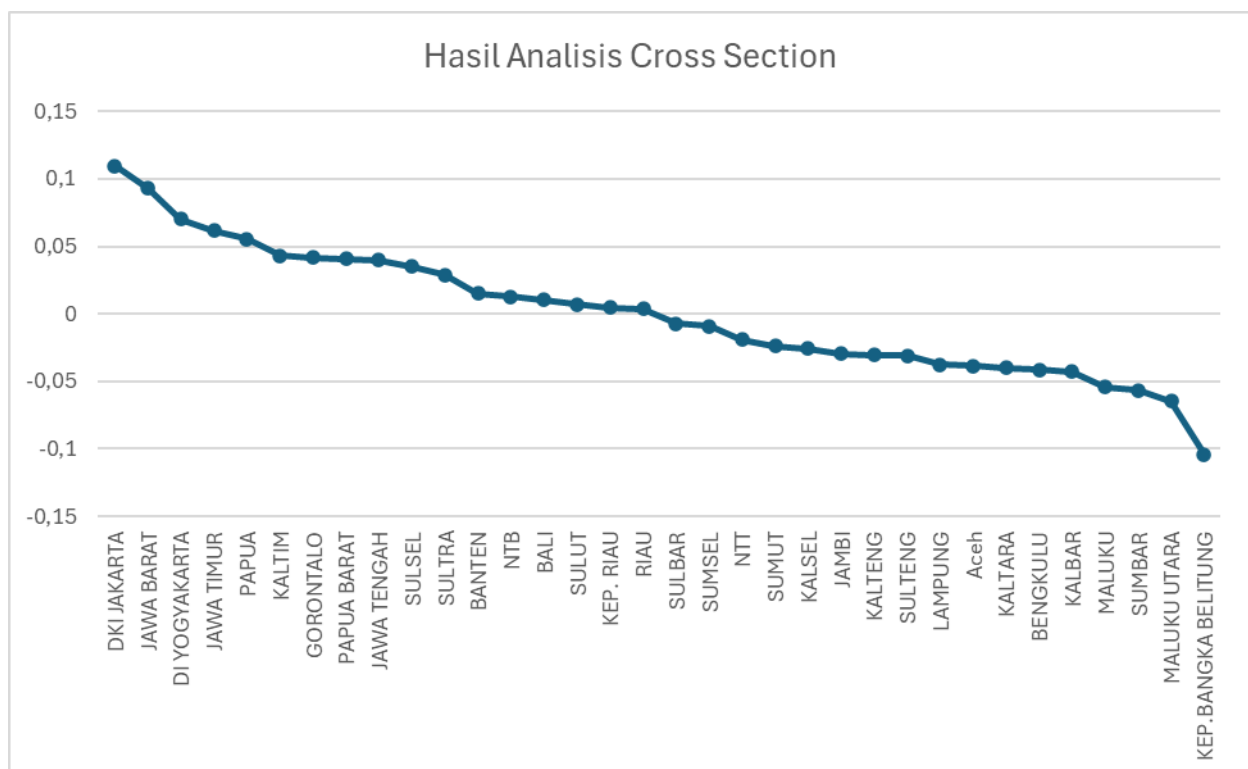
Tabel 4.9 Hasil Analisis Cross Section Effect

No.	Provinsi	Effect
1	Dki Jakarta	0.109838
2	Jawa Barat	0.092979
3	Di Yogyakarta	0.070246
4	Jawa Timur	0.06184
5	Papua	0.055519
6	Kaltim	0.043219
7	Gorontalo	0.041528
8	Papua Barat	0.040562
9	Jawa Tengah	0.039768
10	Sulsel	0.034981
11	Sultra	0.02905
12	Banten	0.014942
13	Ntb	0.012899
14	Bali	0.010226
15	Sulut	0.007134
16	Kep. Riau	0.004849
17	Riau	0.003728
18	Sulbar	-0.007331
19	Sumsel	-0.00912
20	NTT	-0.018989
21	Sumut	-0.023737
22	Kalsel	-0.025592

No.	Provinsi	Effect
23	Jambi	-0.029365
24	Kalteng	-0.030223
25	Sulteng	-0.031026
26	Lampung	-0.03775
27	Aceh	-0.038316
28	Kaltara	-0.039859
29	Bengkulu	-0.041237
30	Kalbar	-0.042587
31	Maluku	-0.054406
32	Sumbar	-0.056462
33	Maluku Utara	-0.064855
34	Kep. Bangka Belitung	-0.103856

Sumber: diolah dari Eviews 12 (2024)

Grafik 4.1 Hasil Analisis Cross Section Effect



Berdasarkan hasil cross section effect di atas, diketahui bahwa Provinsi **DKI Jakarta** memiliki nilai *cross section effect* tertinggi (gini ratio), yaitu sebesar 0.110. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kota-kota besar yang menarik pendatang dan mendorong kesenjangan, dampak pandemi COVID-19 yang memperparah kesenjangan, tingginya

biaya hidup, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, serta peluang usaha bagi orang asing beberapa faktor, termasuk keterbatasan Pendapatan berpenghasilan rendah.

Provinsi **Kep. Bangka Belitung** memiliki nilai cross section effect terendah (gini ratio), yaitu sebesar -0.103. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio Gini yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia karena beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang merata, pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang memadai, dan program pengentasan kemiskinan yang efektif. Namun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan program yang baik dan meningkatkan partisipasi Masyarakat, yang bermakna bahwa masih adanya jarak ketimpangan yang besar antar provinsi DKI Jakarta dengan Kep. Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil data tersebut, dapat diketahui juga bahwa nilai selisih perbedaan Tingkat Gini Ratio antara kedua provinsi yaitu:

Selisih gini ratio: $(0,110 - (-0,103))$

Selisih gini ratio di Indonesia: **0,213**.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pajak terhadap Tingkat Ketimpangan

Berdasarkan hasil regresi data panel maka didapatkan tidak ada pengaruh antara variable pajak terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2018-2022.

Hal ini dimungkinkan karena penggunaan pajak belum menyentuh program-program pengentasan tingkat ketimpangan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kadafi & Murtala, 2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah.

Hal ini dapat membuat daerah yang terbelakang akan kesulitan untuk memenuhi keinginan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak. Perbedaan kondisi pada setiap daerah ini yang dapat menyebabkan kemampuan tiap daerah dalam melaksanakan pembangunan menjadi tidak merata sehingga membuat

proses pembangunan yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lama. (Ridho, 2021).

4.6.2 Pengaruh Subsidi terhadap Tingkat Ketimpangan

Berdasarkan hasil regresi data panel maka didapatkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara variabel subsidi terhadap tingkat ketimpangan di seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2018-2022 sehingga tidak sesuai dengan hipotesis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartanti & Taufiq, 2023) mengatakan hal tersebut dikarenakan pemberian subsidi BBM tidak dinikmati oleh masyarakat miskin tetapi masyarakat yang tidak miskin juga dapat menikmati subsidi BBM tersebut. Sehingga kesenjangan pendapatan akan melebar karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

4.6.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Ketimpangan

Berdasarkan hasil regresi data panel maka didapatkan tidak ada pengaruh antara variabel pengeluaran pemerintah terhadap Tingkat ketimpangan di seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2018-2022.

Hal ini dimungkinkan karena pengeluaran pemerintah belum menyentuh program-program untuk mengatasi tingkat ketimpangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Kadafi & Murtala, 2020) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Tingkat ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2023) menyatakan hal yang serupa bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Ketimpangan. Hal ini dikarenakan oleh alokasi anggaran yang belum tepat sasaran, sehingga kondisi yang terjadi terhadap pengeluaran pemerintah tidak dapat leluasa untuk menurunkan Tingkat ketimpangan dikarenakan belanja rutin yang belum maksimal.

4.6.4 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Ketimpangan

Berdasarkan hasil regresi data panel maka didapatkan adanya pengaruh yang signifikan negatif antara variabel PDRB terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Provinsi Indonesia pada tahun 2018-2022.

Hal ini dimungkinkan karena PDRB dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Adanya PDRB yang baik maka akan membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan daerah tersebut, hingga akhirnya mengurangi tingkat ketimpangan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Vania Grace Sianturi et al., 2021) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartini, 2017) juga menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan yang paling berperan dalam mengelola pendapatan asli daerah sehingga dapat sepenuhnya digunakan untuk menjalankan roda perekonomian yang akhirnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengacu kepada hasil estimasi dan pembahasan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan di 34 Provinsi Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan Pajak tidak berkontribusi dalam peningkatan atau penurunan tingkat ketimpangan. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan pajak belum menyentuh program-program pengentasan ketimpangan.
2. Subsidi berpengaruh positif terhadap Tingkat ketimpangan di seluruh Provinsi Indonesia, hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan subsidi dapat mendorong meningkatnya tingkat ketimpangan. Hal ini dimungkinkan karena penambahan jumlah subsidi menyebabkan tidak mampu terserap di beberapa wilayah yang membutuhkan sehingga Masyarakat yang membutuhkan tidak dapat subsidi yang diberikan dan diikuti naiknya tingkat ketimpangan.
3. Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan di seluruh Provinsi Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah tidak berkontribusi dalam peningkatan atau penurunan tingkat ketimpangan. Hal ini dimungkinkan karena pengeluaran pemerintah belum menyentuh program-program pengentasan ketimpangan.
4. PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 34 Provinsi yang ada di Indonesia sehingga hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan PDRB mampu menurunkan tingkat ketimpangan. Hal ini dimungkinkan karena adanya program-program PDRB yang mampu menurunkan jumlah Tingkat ketimpangan.
5. Penelitian ini menjelaskan bahwa angka pada variabel Subsidi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan di 34 Provinsi yang berada di Indonesia, sedangkan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengacu kepada hasil estimasi dan pembahasan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022”, menghasilkan implikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah di seluruh Provinsi Indonesia harus lebih bijaksana dalam pengelolaan pajak di provinsi Indonesia seperti, meningkatkan pajak progresif terhadap orang kaya, menggunakan pajak untuk program sosial dan infrastruktur, dan reformasi birokrasi perpajakan. Hal ini diharapkan efektif dalam memperbaiki kesenjangan, agar mampu menurunkan Tingkat ketimpangan.
2. Subsidi meningkat berpengaruh dalam tingkat ketimpangan, hal ini disebabkan karena rata-rata subsidi diberikan kepada semua orang, baik kaya maupun miskin. Perlu adanya kebijakan-kebijakan seperti, subsidi LPG, subsidi pupuk, subsidi Listrik, dan subsidi bbm yang bisa dikembangkan agar pemerintah di Provinsi tersebut dapat menurunkan tingkat ketimpangan.
3. Pemerintah di seluruh Provinsi Daerah Indonesia dalam mengelola pengeluaran pemerintah untuk lebih fokus pada program-program seperti, program afirmasi yang efektif, dan kredit UMKM pertanian dan perikanan untuk pengentasan ketimpangan.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdampak dalam penurunan tingkat ketimpangan di Provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat ketimpangan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah PDRB yaitu dengan mengembangkan bidang-bidang utama, memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah, membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, mengembangkan industri kreatif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong transformasi digital sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirman, L., Woroutami, A. D., Aulia, A. F., Akfar, R., Jellema, J., Nazara, S., Wai-Poi, M., & Alatas, V. (2015). *Taxes and Public Spending in Indonesia*.
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektor, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 145–167. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.03>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan ED 5* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Azis, H. A., Laila, N., & Prihantono, G. (2016). The Impact of Fiscal Policy Impact on Income Inequality and Economic Growth: a case Study of District/City in Java. In *Journal of Indonesian Applied Economics* (Vol. 6, Issue 2).
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Djirimu, M. A., Anam, H., & Arifin, Z. (2021). *Analysis of Fiscal Decentralization Effect, Economic Growth, Regional Tax and Labor on Income Inequality in Central Sulawesi Province in 2011-2017 Period*.
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). *Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia*. 2(2), 269–276.
- Dwi, A. (2023). *Redistribusi Dalam Bidang Ekonomi*. <https://feb.umsu.ac.id/redistribusi-dalam-bidang-ekonomi/>
- Gupta, S., Keen, M., Clements, B., Perry, V., Coady, D., De Mooij, R., Fabrizio, S., Shang, B., Dizioli, A., Eyraud, L., Feher, C., Flamini, V., Kangur, A., Kapsoli, J., Mulas-Granados, C., Mullins, P., Wingender, P., Benedek, D., Espiritu, R., ... Radisavljević, M. (2014). *Fiscal Policy and Income Inequality*.
- Hardinandar, F. (2020). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Trade-Off Antara Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. *Economic and Businessness*, 16(1), 1–10.
- Hartanti, A. N., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Subsidi Bbm Terhadap Disparitas Pendapatan Indonesia. *Journal*

of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 7(1), 626–636.
<https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6311>

Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. *Skripsi*, 1–91.

Harun, L., & Maski, G. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Encyclopedia of Volcanoes.*, 1995, 662.

Hasanuddin, M., & Nazir, H. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syariah*. Kafa Publishing.

Jamil, H. (2017). Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–12.

Kadafi, M., & Murtala, M. (2020a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>

Kadafi, M., & Murtala, M. (2020b). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023a). *Angka Kemiskinan Semakin Turun, Kepala BKF: Sejalan Menguatnya Aktivitas Ekonomi*. Kemenkeu.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2023b). *POSTUR APBD*. Kemenkeu.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2018&provinsi=--&pemda=-->

Kuncoro. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.

- Kurnaini, Z. D., Utomo, W., Iskandarsyah, N., Syafelifitria, I., Handayani, H., Parlaungan, K. T., Marlina, I., Wibowo, G., Ramli, M., Faturay, F., Sugiyarto, A., Noor, M. I., Nugroho, S. S., Wicaksono, E., & Irfan, M. (2021). *Peran Kebijakan Fiskal pada Produktivitas, Kemiskinan, dan Ketimpangan: Ditinjau dari Efektivitas Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perpajakan*. Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2443-peran-kebijakan-fiskal-pada-produktivitas-kemiskinan-dan-ketimpangan-ditinjau-dari-efektivitas-subsidi-bantuan-sosial-dan-perpajakan>
- Latifah, & Rahayu, D. (2019). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antar Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 983–994.
- Maftuchan, A. (2014). Ketimpangan Perpajakan di Indonesia : Pemetaan Awal atas Area dan Pilihan. *INFID, OXFAM Dan Uni Eropa*, 129–147.
- Majid, M. A. (2018). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB di Provinsi Gorontalo*.
- Mangun, N. (2011). Kebijakan Fiskal Menurut Fungsi Di Regional Sulawesi Dan Nusa Tenggara Timur. *Media Litbang Sulteng*, IV(2), 111–117.
- Mangundap, V. H., Kumenaung, A. G., & Siwu, H. F. D. (2024). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Minabasa, Kota Tomohon dan Kota Manado*. 24(2), 25–36.
- Mankiw, G. (2013). Defending the One Percent. *Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 21–34. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1257/jep.27.3.21>
- Nasution, M. (2020). *Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia* (Vol. 5, Issue 2).
- Nazir. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar Retribusi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nugroho, Y. (2023). *Analisis Ketimpangan di Jawa Barat Tahun 2001-2017*.
- Nurlaili, A. (2006). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2007-2013*.

- Putri, C. A. (2022). *Sri Mulyani: Subsidi Dimakan Orang Kaya, Kesenjangan Melebar*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220826203238-4-367015/sri-mulyani-subsidi-dimakan-orang-kaya-kesenjangan-melebar>
- Ridho, M. A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- S, M., Sahade, & Rijal, S. (2023). Analysis of The Effectiveness of Fiscal Policy in Driving the Regional Economy: Case Study in South Sulawesi Province, Indonesia. In *International Journal of Business* (Vol. 4, Issue 2).
- Satu Data Kediri. (n.d.). *Indikator Kinerja Utama Indeks Gini (gini ratio)*. Satu Data Kediri. https://satudata.kedirikota.go.id/data_iku/detail/22-indeks-gini-gini-ratio
- Setiabudi, A. W. (2017). Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia tahun 1970-2008. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 151–179. <https://doi.org/10.25170/jara.v10i2.44>
- Simonsen, Y. (2011). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)*.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono.
- Sudirman, I. W. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Kencana.
- Sukirno, S. (2010). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Suparmoko, M. (2011). *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek* (4th ed.). Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006a). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006b). *Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi ke-9* (9th ed.). Erlangga.
- Vania Grace Sianturi, M. Syafii, & Ahmad Albar Tanjung. (2021). Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125–133. <https://doi.org/10.33059/jse.v5i2.4270>
- Verawati. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017*. 1(1), 2019.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis Ed.2*. Ekonosia.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia. In Yogyakarta: Penerbit YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Gini Ratio, Pajak, Subsidi, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB

Periode	Provinsi	Gratio (Persen)	Tax (Miliar Rupiah)	Sub (Miliar Rupiah)	Gexp (Miliar Rupiah)	PDRB (Miliar Rupiah)
2018	Aceh	0,318	5.060,92	8,47	38.767,09	24.013,79
2019	Aceh	0,321	1.902,77	8,33	45.620,69	24.842,30
2020	Aceh	0,319	1.929,10	6,27	41.793,83	25.018,28
2021	Aceh	0,323	2.012,27	3,93	41.937,49	25.357,70
2022	Aceh	0,291	2.236,80	19,94	43.594,01	26.063,50
2018	SUMUT	0,311	7.874,45	20,89	54.147,82	35.570,50
2019	SUMUT	0,315	8.184,62	0,86	57.910,33	36.853,59
2020	SUMUT	0,314	7.798,45	40,69	53.948,87	36.175,16
2021	SUMUT	0,313	9.046,73	4,80	55.094,12	36.666,20
2022	SUMUT	0,326	10.505,78	3,58	57.376,47	37.943,83
2018	SUMBAR	0,305	2.482,25	14,54	26.017,45	30.470,80
2019	SUMBAR	0,307	2.605,19	2,65	27.667,83	31.427,29
2020	SUMBAR	0,301	2.462,10	6,73	25.857,65	30.696,21
2021	SUMBAR	0,300	2.786,16	24,68	25.844,84	31.360,79
2022	SUMBAR	0,292	3.110,86	24,84	26.147,69	32.377,51
2018	RIAU	0,347	4.264,74	21,83	28.817,91	70.736,77
2019	RIAU	0,331	4.402,48	39,65	32.590,50	72.509,14

2020	RIAU	0,321	4.054,47	33,38	30.669,73	76.884,74
2021	RIAU	0,327	4.813,55	29,63	31.070,01	77.995,51
2022	RIAU	0,323	5.697,33	31,69	33.298,59	80.057,79
2018	JAMBI	0,335	1.882,59	17,49	17.331,54	40.025,52
2019	JAMBI	0,324	1.853,48	16,15	19.665,28	41.812,35
2020	JAMBI	0,316	1.751,91	21,84	18.073,86	41.926,04
2021	JAMBI	0,315	2.074,22	13,81	18.037,55	42.906,66
2022	JAMBI	0,335	2.463,16	14,14	18.721,86	44.536,39
2018	SUMSEL	0,341	4.479,56	48,03	35.413,57	35.659,82
2019	SUMSEL	0,339	4.722,41	59,55	42.097,23	37.125,75
2020	SUMSEL	0,338	4.613,36	68,00	40.214,24	37.323,24
2021	SUMSEL	0,340	5.099,58	16,71	40.429,50	38.172,97
2022	SUMSEL	0,330	6.485,77	7,75	41.694,52	39.676,95
2018	BENGGKULU	0,355	865,30	0	11.757,59	22.494,84
2019	BENGGKULU	0,329	827,10	0	12.684,18	23.504,53
2020	BENGGKULU	0,323	739,46	0	12.082,87	23.105,92
2021	BENGGKULU	0,321	974,61	0	11.848,33	23.539,17
2022	BENGGKULU	0,315	1.122,27	0	11.951,58	24.230,02
2018	LAMPUNG	0,326	3.389,86	2,44	29.040,59	27.736,26
2019	LAMPUNG	0,331	3.599,40	2,73	29.130,58	28.894,50
2020	LAMPUNG	0,320	3.294,01	1,00	28.595,23	26.746,64
2021	LAMPUNG	0,314	3.696,77	1,14	28.789,46	27.193,59
2022	LAMPUNG	0,313	4.280,26	5,35	28.954,69	28.064,39

2018	KEP.BANGKA BELITUNG	0,272	1.200,70	0,52	8.657,81	35.762,04
2019	KEP.BANGKA BELITUNG	0,262	1.171,67	0,63	9.671,95	37.173,14
2020	KEP.BANGKA BELITUNG	0,257	977,82	1,55	9.037,41	36.307,61
2021	KEP.BANGKA BELITUNG	0,247	1.216,04	1,86	8.937,95	37.585,50
2022	KEP.BANGKA BELITUNG	0,255	1.422,57	3,94	9.350,77	38.674,15
2018	KEP. RIAU	0,339	2.558,70	0	11.649,49	81.206,20
2019	KEP. RIAU	0,337	2.832,33	1,67	13.167,55	81.138,52
2020	KEP. RIAU	0,334	2.227,57	4,31	12.508,82	85.012,58
2021	KEP. RIAU	0,339	2.548,32	0	12.272,09	85.425,89
2022	KEP. RIAU	0,325	3.105,09	1,69	13.066,28	87.238,26
2018	DKI JAKARTA	0,390	37.538,91	2.640,95	61.410,12	165.768,99
2019	DKI JAKARTA	0,391	40.298,12	2.782,93	64.938,36	174.812,51
2020	DKI JAKARTA	0,400	31.895,26	3.628,17	52.088,13	170.089,02
2021	DKI JAKARTA	0,411	34.575,56	4.355,29	61.619,04	174.941,72
2022	DKI JAKARTA	0,412	40.275,15	6.278,33	64.865,12	182.908,69
2018	JAWA BARAT	0,405	30.915,27	128,61	119.963,28	29.160,06
2019	JAWA BARAT	0,398	33.954,58	133,82	129.716,96	30.413,37
2020	JAWA BARAT	0,398	29.637,05	144,29	129.048,15	30.180,54
2021	JAWA BARAT	0,406	33.158,68	86,17	130.637,22	30.907,59
2022	JAWA BARAT	0,412	38.052,81	43,82	128.860,25	32.182,15

2018	JAWA TENGAH	0,357	16.464,01	1,41	100.372,35	27.285,25
2019	JAWA TENGAH	0,358	17.592,39	1,51	106.293,66	28.695,92
2020	JAWA TENGAH	0,359	16.380,14	11,20	101.430,17	26.483,68
2021	JAWA TENGAH	0,368	17.391,43	3,33	103.814,45	27.144,18
2022	JAWA TENGAH	0,366	20.533,04	10,83	105.931,69	28.362,24
2018	DI YOGYAKARTA	0,422	3.014,26	0,00	14.948,19	25.776,31
2019	DI YOGYAKARTA	0,428	3.211,46	76,07	16.143,71	27.008,68
2020	DI YOGYAKARTA	0,437	2.823,94	78,04	14.851,76	27.754,47
2021	DI YOGYAKARTA	0,436	2.932,00	73,32	15.581,24	28.918,82
2022	DI YOGYAKARTA	0,459	3.632,81	72,26	16.127,34	30.011,22
2018	JAWA TIMUR	0,371	24.425,32	185,31	116.724,14	39.579,95
2019	JAWA TIMUR	0,364	25.484,48	32,05	129.179,51	41.512,20
2020	JAWA TIMUR	0,364	23.263,32	30,28	122.610,10	39.686,19
2021	JAWA TIMUR	0,364	25.257,95	10,82	126.962,87	40.821,89
2022	JAWA TIMUR	0,365	28.999,81	27,03	132.262,51	42.717,44
2018	BANTEN	0,367	11.993,27	0,00	34.150,82	34.183,75

2019	BANTEN	0,361	13.407,83	7,40	36.934,20	35.913,90
2020	BANTEN	0,365	11.309,59	5,43	32.749,66	37.165,16
2021	BANTEN	0,363	13.010,54	33,19	36.102,66	38.217,80
2022	BANTEN	0,377	15.738,09	36,85	37.758,58	39.515,38
2018	BALI	0,364	8.846,20	15,34	24.932,93	35.896,35
2019	BALI	0,370	9.743,45	15,07	26.067,82	37.297,50
2020	BALI	0,369	5.413,67	6,06	22.604,13	34.216,52
2021	BALI	0,375	4.971,10	0,02	21.726,64	32.975,85
2022	BALI	0,362	8.398,45	5,64	23.549,99	34.160,65
2018	NTB	0,391	1.805,81	0,00	20.385,98	18.020,50
2019	NTB	0,374	2.004,86	1,50	21.184,11	18.219,11
2020	NTB	0,386	1.792,20	2,03	20.165,39	17.583,11
2021	NTB	0,384	1.973,71	2,51	20.487,56	17.706,47
2022	NTB	0,374	2.401,15	3,31	21.950,05	18.648,19
2018	NTT	0,359	1.268,59	0,00	26.052,58	12.273,85
2019	NTT	0,355	1.397,79	0,00	27.845,86	12.761,98
2020	NTT	0,356	1.301,11	0,00	27.332,42	12.960,95
2021	NTT	0,339	1.329,40	0,50	26.719,30	13.092,81
2022	NTT	0,340	1.646,40	0,14	26.649,45	13.298,85
2018	KALBAR	0,325	2.875,51	0,00	24.182,51	26.110,57
2019	KALBAR	0,318	2.863,60	0,00	25.599,52	27.199,78
2020	KALBAR	0,325	2.588,82	0,52	24.826,92	24.953,61
2021	KALBAR	0,315	2.987,61	0,00	26.117,75	25.811,97
2022	KALBAR	0,311	3.668,97	9,35	25.522,01	26.774,75

2018	KALTENG	0,344	1.808,43	20,47	20.425,63	35.548,43
2019	KALTENG	0,335	1.970,57	6,89	21.609,29	37.870,47
2020	KALTENG	0,320	1.654,24	7,05	20.594,66	37.148,73
2021	KALTENG	0,320	1.944,52	7,21	20.733,81	37.925,62
2022	KALTENG	0,309	2.728,82	12,44	22.393,65	39.799,98
2018	KALSEL	0,340	3.568,81	0,00	22.957,18	30.614,85
2019	KALSEL	0,334	3.579,98	0,00	26.125,86	31.611,46
2020	KALSEL	0,351	2.892,71	0,00	25.101,25	32.212,30
2021	KALSEL	0,325	3.384,41	0,00	25.292,58	32.849,02
2022	KALSEL	0,309	4.760,88	1,06	27.951,46	34.035,52
2018	KALTIM	0,342	5.927,89	4,81	30.825,74	127.354,19
2019	KALTIM	0,335	6.414,51	3,98	37.475,53	134.410,55
2020	KALTIM	0,335	5.139,85	0,00	33.970,87	125.764,53
2021	KALTIM	0,331	6.215,83	12,00	34.207,41	127.208,24
2022	KALTIM	0,317	9.329,81	0,26	39.596,43	131.136,62
2018	KALTARA	0,292	497,32	26,25	7.533,81	80.204,84
2019	KALTARA	0,304	551,41	32,13	7.801,22	88.299,52
2020	KALTARA	0,300	470,59	35,09	8.421,25	86.823,59
2021	KALTARA	0,285	559,19	24,75	7.977,26	88.510,41
2022	KALTARA	0,270	828,19	26,06	8.354,39	91.424,16
2018	SULUT	0,372	1.591,22	2,56	16.789,76	33.911,61
2019	SULUT	0,376	1.659,35	3,05	17.503,16	35.687,44
2020	SULUT	0,368	1.384,78	0,00	17.236,43	33.670,44
2021	SULUT	0,359	1.600,09	0,06	16.663,05	34.787,33

2022	SULUT	0,359	1.867,42	3,75	17.413,22	36.385,08
2018	SULTENG	0,317	1.168,77	0,60	18.252,57	39.049,35
2019	SULTENG	0,330	1.271,72	0,60	20.051,40	42.054,50
2020	SULTENG	0,321	1.259,19	0,85	20.990,65	45.052,32
2021	SULTENG	0,326	1.532,36	257,57	20.104,45	49.587,96
2022	SULTENG	0,305	1.876,60	4,38	21.100,41	56.285,05
2018	SULSEL	0,388	5.270,31	8,54	41.656,24	35.243,64
2019	SULSEL	0,391	5.743,30	1,90	42.962,09	37.474,29
2020	SULSEL	0,382	5.209,06	1,94	42.320,19	36.246,26
2021	SULSEL	0,377	5.822,63	36,33	42.156,81	37.572,54
2022	SULSEL	0,365	6.712,54	5,64	42.874,97	39.115,98
2018	SULTRA	0,392	928,04	8,57	18.160,81	33.278,66
2019	SULTRA	0,393	1.140,65	6,45	19.882,10	35.309,90
2020	SULTRA	0,388	1.045,11	0,03	19.571,59	35.708,60
2021	SULTRA	0,394	1.385,09	58,69	20.224,47	36.581,67
2022	SULTRA	0,366	1.587,46	0,07	21.739,79	37.998,09
2018	GORONTALO	0,417	475,54	0,00	7.637,81	22.538,55
2019	GORONTALO	0,41	536,95	0,00	8.090,30	24.167,56
2020	GORONTALO	0,406	466,16	0,00	7.619,61	24.313,38
2021	GORONTALO	0,409	531,37	0,11	7.858,45	24.649,73
2022	GORONTALO	0,423	596,37	0,11	8.123,04	25.392,40
2018	SULBAR	0,366	350,52	0,00	7.594,61	22.953,08
2019	SULBAR	0,365	377,72	0,00	8.320,94	24.163,56
2020	SULBAR	0,356	370,68	0,00	7.868,75	22.666,22

2021	SULBAR	0,366	426,09	0,00	7.708,83	22.896,20
2022	SULBAR	0,371	470,64	0,00	7.905,09	23.073,25
2018	MALUKU	0,326	537,01	16,26	13.946,63	16.607,02
2019	MALUKU	0,32	561,93	23,05	14.064,70	17.556,86
2020	MALUKU	0,326	543,89	29,22	13.375,23	16.688,12
2021	MALUKU	0,316	566,81	27,65	13.736,40	17.020,46
2022	MALUKU	0,306	714,61	19,62	13.411,56	17.708,13
2018	MALUKU UTARA	0,336	389,26	2,29	11.046,33	20.309,45
2019	MALUKU UTARA	0,31	476,07	6,49	12.029,57	21.524,99
2020	MALUKU UTARA	0,29	474,97	0,69	11.620,86	21.915,03
2021	MALUKU UTARA	0,278	593,02	3,65	12.056,77	25.199,92
2022	MALUKU UTARA	0,309	858,63	8,75	13.380,92	30.506,50
2018	PAPUA BARAT	0,391	497,63	19,60	21.254,51	64.499,45
2019	PAPUA BARAT	0,381	555,21	16,81	26.003,94	64.418,52
2020	PAPUA BARAT	0,376	512,83	23,94	26.212,93	54.487,70
2021	PAPUA BARAT	0,374	569,81	7,13	22.003,65	52.980,01
2022	PAPUA BARAT	0,384	728,69	16,20	23.509,54	52.833,61
2018	PAPUA	0,398	1.305,62	91,38	51.086,73	48.069,41
2019	PAPUA	0,391	2.047,83	76,73	51.993,33	40.203,42
2020	PAPUA	0,395	1.457,09	59,75	47.564,27	32.108,51

2021	PAPUA	0,396	2.318,53	37,53	50.333,46	36.431,25
2022	PAPUA	0,393	1.957,47	38,88	52.011,88	39.131,31

Lampiran 2

Common Effect Model

Dependent Variable: GRATIO				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/25/24 Time: 17:06				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 34				
Total panel (unbalanced) observations: 169				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.351846	0.007148	49.22498	0.0000
TAX	1.58E-06	9.41E-07	1.681079	0.0947
SUB	1.20E-05	7.24E-06	1.663975	0.0980
GEXP	-3.81E-08	2.30E-07	-0.165669	0.8686
PDRB	-3.18E-07	1.21E-07	-2.625283	0.0095
Root MSE	0.036131	R-squared		0.156365
Mean dependent var	0.347645	Adjusted R-squared		0.135788
S.D. dependent var	0.039455	S.E. of regression		0.036678
Akaike info criterion	-3.744134	Sum squared resid		0.220626

Schwarz criterion	-3.651534	Log likelihood	321.37 94
Hannan-Quinn criter.	-3.706555	F-statistic	7.5991 93
Durbin-Watson stat	0.086732	Prob(F-statistic)	0.0000 12

Lampiran 3

Fixed Effect Model

Dependent Variable: GRATIO				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/25/24 Time: 17:09				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 34				
Total panel (unbalanced) observations: 169				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.391666	0.016813	23.29493	0.0000
TAX	2.92E-07	8.61E-07	0.338908	0.7352
SUB	9.40E-06	3.45E-06	2.723807	0.0073
GEXP	-5.48E-07	5.06E-07	-1.082942	0.2808
PDRB	-6.62E-07	3.46E-07	-1.913711	0.0578
Effects Specification				
Root MSE	0.008460	R-squared		0.953744
Mean dependent var	0.347645	Adjusted R-squared		0.940679

S.D. dependent var	0.039455	S.E. of regression	0.009610
Akaike info criterion	-6.257123	Sum squared resid	0.012097
Schwarz criterion	-5.553359	Log likelihood	566.7269
Hannan-Quinn criter.	-5.971523	F-statistic	73.00116
Durbin-Watson stat	1.474876	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4

Random Effect Model

Dependent Variable: GRATIO				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/25/24 Time: 17:10				
Sample: 2018 2022				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 34				
Total panel (unbalanced) observations: 169				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.360143	0.012240	29.42282	0.0000
TAX	6.09E-07	7.60E-07	0.801383	0.4241
SUB	9.37E-06	3.30E-06	2.837443	0.0051
GEXP	-9.81E-09	2.71E-07	-0.036159	0.9712
PDRB	-3.86E-07	1.92E-07	-2.014547	0.0456

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.037631	0.9388
Idiosyncratic random		0.009610	0.0612
Weighted Statistics			
Root MSE	0.00957 4	R-squared	0.057284
Mean dependent var	0.03957 1	Adjusted R-squared	0.034291
S.D. dependent var	0.00999 5	S.E. of regression	0.009719
Sum squared resid	0.01549 2	F-statistic	2.491347
Durbin-Watson stat	1.15753 5	Prob(F-statistic)	0.045176
Unweighted Statistics			
R-squared	0.08467 4	Mean dependent var	0.347645
Sum squared resid	0.23937 5	Durbin-Watson stat	0.074913

Lampiran 5

Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FE			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	68.430661	(33,131)	0.0000
Cross-section Chi-square	490.69513 1	33	0.0000

Lampiran 6

Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.843734	4	0.0975